

KESENJANGAN KOMUNIKASI ANTARA RAKYAT DAN PEMIMPIN

Oleh Nurcholish Madjid

Apakah ada kesenjangan komunikasi antara rakyat dan pemimpin? Jawabnya sangat tergantung kepada apa yang kita maksudkan dengan komunikasi. Jika komunikasi diartikan secara harfiah, mungkin kesenjangan atau *gap* itu tidak ada. Sebab dengan adanya kebiasaan para pemimpin, termasuk Presiden sendiri, untuk mengadakan kontak-kontak langsung dengan rakyat dalam kunjungan-kunjungan inkognito, maka komunikasi itu secara material ada. Apalagi dialog-dialog yang dilakukan acapkali berkisar pada masalah-masalah yang dihadapi rakyat, umpamanya perdagangan eceran di pasar, masalah-masalah pertanian di desa dan seterusnya.

Tetapi jika komunikasi yang dimaksudkan itu lebih dari pengertian-pengertian harfiah, maka mempermasalahkan ada tidaknya kesenjangan itu cukup penting dalam rangka perenungan masalah-masalah nasional pada hari proklamasi yang ke-28 ini. Komunikasi di sini ialah terutama dimaksudkan dengan pengertian atau “*understanding*”. Adanya komunikasi ialah keadaan di mana rakyat betul-betul dapat memahami aspirasi-aspirasi pemimpin dan makna kepemimpinan yang dijalankan. Mereka sanggup menemukan dan merasakan dalam kepemimpinan itu perpautan atau korelasi dengan kehidupannya dalam arti seluas mungkin.

Contoh yang mudah dikemukakan tentang kepemimpinan serupa itu ialah Bung Karno. Segi-segi positif daripada kepemimpinan

Bung Karno ialah keberhasilannya dalam membina komunikasi dengan rakyat. Bagi rakyat Bung Karno adalah sebagian dari mereka. Bung Karno menjadi salah satu unsur konsep kosmologis rakyat, khususnya Jawa, karena ia menempati kedudukan tokoh mitologis Jawa sebagai Ratu Adil yang dinanti-nantikan. Hal itu tidak terjadi dan berjalan begitu saja. Agaknya Bung Karno sendiri pun dengan sadar membangun gambaran diri (*image*) demikian. Sering ia mengemukakan pikiran-pikirannya dengan mengikuti kerangka berpikir menurut konsep kosmologis Jawa itu sebagaimana terdapat dalam pewayangan. Ketika Bung Karno mengklaim untuk dirinya sebagai penyambung lidah rakyat maka kenyataan-kenyataan tersebut tadi merupakan alasannya yang cukup kuat. Justru fungsi Bung Karno sebagai unsur kelengkapan mitologi Jawa itu lebih efektif daripada fungsinya sebagai pemangku kepemimpinan menurut konsep modern selaku Presiden sebuah Republik. Bagi para pengikutnya, dalil “*pejah gesang nderek* Bung Karno” adalah semacam ucapan religius atau setidaknya magis yang dihayati betul-betul. Tapi jika segi-segi itu positif dari sudut pandangan komunikasi, sudah terang segi-segi itu adalah negatif dari sudut pandangan lainnya. Sebab berpegangan secara terlampau erat kepada konsep-konsep kepemimpinan tradisional sebagaimana terdapat dalam pandangan-pandangan hidup rakyat, seorang pemimpin akan mudah terjebak ke dalam lumpur tradisionalisme yang dapat membuatnya kehilangan wawasan masa depan. Pemimpin karismatik lebih cenderung untuk berperan sebagai pembina solidaritas daripada pemecah masalah. Dalam membina solidaritas itu gambaran pemimpin sebagai seorang yang agung, seorang bapak, seorang pengilham adalah penting sekali. Kompleks kepemimpinan serupa itu sering mendorong seorang pemimpin karismatik menderita megalomaniak atau penyakit keranjingan kebesaran diri. Kita rasakan bahwa hal itu banyak menghinggapi para pemimpin karismatik kita. Umumnya mereka menitikberatkan pada kepemimpinan itu begitu rupa sehingga dapat diterima menurut ukuran-ukuran tradisional dan nilai-nilainya.

Karena itu jika Bung Karno kita ambil sebagai misal bukanlah maksud kita untuk dijadikan percontohan. Melainkan hanya karena Bung Karno merepresentasi jenis kepemimpinan yang komunikatif secara ekstrem atau tajam.

Orde Baru untuk banyak orang merupakan alternatif daripada Orde Lama. Hal itu berarti bahwa segala sesuatu yang ada pada Orde Lama harus diganti. Maka begitulah kepemimpinan karismatik yang sarat ideologi dan doktrin ditukar oleh jenis sebaliknya yaitu kepemimpinan administratif yang sarat teknokrasi dan pragmatisme. Di sinilah mulai timbul masalah kesenjangan komunikasi tadi. Sebab dalam kepemimpinan jenis kedua itu, di mana pendekatan-pendekatan *problem solving* adalah yang paling dominan, bahasa-bahasa teknis adalah bahasa-bahasa kalangan kaum terpelajar, dan sedikit demi sedikit menyisihkan ke pingir orang-orang yang tidak memahaminya, dalam hal ini terutama rakyat banyak. Mungkin dapat dibenarkan klaim bahwa para ahli atau kaum teknokrat adalah lebih tahu tentang apa yang diperlukan rakyat daripada rakyat sendiri. Tetapi kesenjangan komunikasi, dikehendaki ataupun tidak, mempunyai akibat-akibat praktisnya yang riil. Pertama-tama ialah rasa keterasingan. Kemudian dapat menjelma menjadi sikap masa bodoh atau apatis, lalu berlanjut kepada frustrasi. Apakah kebutuhan seseorang terpenuhi atau tidak, tetapi jelas rasa kecewa karena kehilangan rasa ikut serta itu lebih mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Dengan manipulasi secukupnya melalui indoktrinasi seorang demagog, frustrasi sosial itu dapat diubah menjadi sumber tenaga untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan politik yang acapkali bersifat radikal dan destruktif. Meskipun frustrasi akibat kesenjangan komunikasi itu mungkin bukan satu-satunya sebab timbulnya peledakan sosial-politik seperti peristiwa 5 Agustus di Bandung, tetapi dari sudut pandangan itu pula salah satu penelaahan harus dilakukan. Jelas pola kepemimpinan Bung Karno sudah tidak cocok lagi. Tetapi tentu ada segi-segi positif yang boleh direnungkan kembali. [❖]